

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) adalah dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dalam pemerintahan yang transparan dan akuntabel, tentunya ada suatu jaminan bahwa segala informasi atau peristiwa penting kegiatan pemerintah terekam dengan baik dalam suatu ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi ke dalam bentuk laporan keuangan. Melalui laporan keuangan pemerintah, informasi yang dibutuhkan berbagai pihak seperti masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah itu sendiri untuk pengambilan keputusan akan dapat disajikan secara komprehensif.

Pengelolaan keuangan yang transparan menjadi tuntutan masyarakat guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*). Hal ini diharapkan oleh masyarakat dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, karena pada dasarnya uang yang dikelola pemerintah itu bersumber dari rakyat sendiri, sehingga wajar jika masyarakat menginginkan kualitas pelayanan yang terbaik. Selain itu, dengan adanya transparansi pelaporan keuangan di pemerintahan daerah menjadikan masyarakat dapat mengetahui dan

mengawasi secara langsung tentang tata kelola keuangan di pemerintahan daerah.

Dalam mekanisme tata kelola, pelaporan keuangan memiliki dua tujuan, yaitu organisasi yang transparan dan keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Hess, 2007 dalam Ridha dan Basuki, 2012). Masyarakat memiliki hak dasar untuk tahu (*basic right to know*) dan memperoleh informasi mengenai apa yang sedang dilakukan pemerintah, dan mengapa suatu kebijakan atau program dilakukan (Stiglitz, 1999 dalam Ridha dan Basuki, 2012) serta bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya (Silver, 2005 dalam Ridha dan Basuki, 2012).

Beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah berusaha untuk membudayakan transparansi di daerahnya dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur khusus mengenai transparansi. Di Indonesia, setidaknya terdapat 12 kabupaten atau kota yang telah memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai transparansi pengelolaan keuangan dan partisipasi masyarakat ([radarbanten.com](http://radarbanten.com)). Beberapa kabupaten atau kota yang telah memiliki peraturan daerah tentang transparansi diantaranya adalah Kabupaten Lebak, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Solok, Kabupaten Magelang, Kota Surabaya, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kota Surakarta. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah sangat menyadari akan pentingnya transparansi dalam tata kelola keuangan daerah. Akan tetapi, dalam praktiknya peraturan-peraturan daerah

ini masih sulit untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah terutama pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Transparansi pada hakekatnya dapat memberikan dampak yang positif pada organisasi. Kebanyakan peraturan daerah tentang transparansi yang ada tidak memiliki sanksi, sehingga sulit dalam pelaksanaan dan penegakannya. Oleh karena itu, butuh komitmen yang tinggi oleh segenap jajaran pemerintah daerah untuk menerapkan transparansi pengelolaan keuangan.

Saat ini masih belum banyak penelitian empiris yang dilakukan di Indonesia mengenai penerapan transparansi pelaporan keuangan di pemerintah daerah. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk meneliti faktor-faktor yang memengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan, khususnya di Provinsi DIY.

Penelitian ini bertujuan memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan di pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan transparansi pelaporan keuangan yang didorong oleh adanya tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, kinerja pegawai, dan sistem pengendalian internal.

Faktor pertama yaitu tekanan eksternal, tekanan eksternal berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah karena adanya desakan yang timbul dari luar pemerintahan yang menginginkan adanya

transparansi pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah.

Faktor kedua yaitu ketidakpastian lingkungan, ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah karena adanya suatu tindakan yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintahan itu sendiri baik masalah internal maupun peraturan transparansi pelaporan keuangan, seperti faktor lingkungan yang sering berubah, ketidakpastian ini dapat memengaruhi beberapa hal yang sudah diatur atau ditetapkan oleh organisasi sebelumnya.

Faktor ketiga yaitu komitmen manajemen, komitmen manajemen berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah karena kebijakan yang diambil organisasi tergantung pada bagaimana komitmen manajemen tersebut, apabila manajemen menjalankan komitmen dan melaksanakan dengan baik maka akan berpengaruh positif terhadap perusahaan dan begitu juga sebaliknya.

Faktor keempat yaitu kinerja pegawai, kinerja pegawai berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah karena kinerja pegawai dapat dikaitkan dengan hasil atau output yang dihasilkan oleh sebuah organisasi, sehingga ada yang memengaruhi kombinasi kinerja pegawai antara lain kuantitas output, kualitas output, jangka waktu output, kehadiran di tempat kerja dan sikap kooperatif yang mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan.

Faktor kelima yaitu sistem pengendalian internal, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 pemerintah menetapkan adanya suatu sistem pengendalian intern yang harus dilaksanakan, baik padatingkat pemerintah pusat maupun daerah. Sistem pengendalian internal dimaksud adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern tersebut berguna untuk mengendalikan kegiatan pemerintahan dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Ridha dan Basuki, (2012) yang berjudul **“Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan”**. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini menambah dua variabel independen karena berdasarkan saran dari penelitian sebelumnya, yaitu variabel kinerja pegawai dan sistem pengendalian internal.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan?

2. Apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan ?
3. Apakah komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan?
4. Apakah kinerja pegawai berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan?
5. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Tekanan Eksternal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
2. Ketidakpastian Lingkungan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
3. Komitmen Manajemen berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
4. Kinerja Pegawai berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
5. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian tidak hanya bermanfaat bagi penelitiannya saja, akan tetapi seharusnya juga bisa memberikan manfaat bagi ke semua pihak. Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Teoritis
  - a. Dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, kinerja pegawai, dan sistem pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
  - b. Dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan memberikan hasil penelitian mengenai pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, dan kinerja pegawai dan sistem pengendalian intern terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
2. Praktisi
  - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pengetahuan berupa pengembangan teori, terutama dalam bidang akuntansi sektor publik.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan di sektor publik, khususnya organisasi pemerintah.

- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi homogenitas penerapan kebijakan transparansi pelaporan keuangan.
- d. Diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap faktor-faktor penerapan transparansi pelaporan keuangan dapat memberikan masukan dan gambaran bagi Kepala Daerah guna memperbaiki, meningkatkan, dan memformulasikan kebijakannya di masa yang akan datang.